

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SUMATERA
BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi S1
(Strata Satu) Pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Negeri Padang*



RAIHANA DZAKIYYAH ZULFIAN

2019/19060118

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

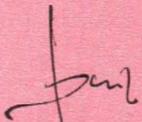
**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT**

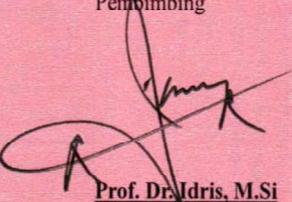
Nama : Raihana Dzakiyyah Zulfian
NIM/TM : 19060118/2019
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Juli 2023

Mengetahui,
Kepala Departemen Ilmu Ekonomi,

Disetujui dan Disahkan oleh :
Pembimbing


Dr. Novva Zulva Riani, SE, M.Si
NIP. 19711104 200501 2 001


Prof. Dr. Idris, M.Si
NIP. 19610703 198503 1 005

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

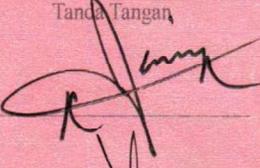
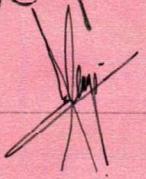
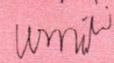
Universitas Negeri Padang

**PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Raihana Dzakiyyah Zulfian
NIM/TM : 19060118/2019
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Juli 2023

Tim Penguji :

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Prof. Dr. Idris, M.si	1. 
2	Anggota	Dr. Alpon Satrianto, S.E, M.E	2. 
3	Anggota	Urmatul Uska Akbar, S.E, M.E	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Raihana Dzakiyyah Zulfian
NIM/TM : 19060118/2019
Tempat/Tanggal Lahir: Padang/ 24 Juli 2001
Departemen : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Handayani IV No. 115, Perumdam 3, Siteba
No. HP/Telepon : 081261915686
Judul Skripsi : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat

Dengan Ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), Baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasi kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Jurusan

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Juli 2023

Yang Menyatakan,



Raihana Dzakiyyah Zulfian

NIM. 19060118

ABSTRAK

Raihana Dzakiyyah Zulfian 19060118/2019 : Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat. Skripsi Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dibawah Bimbingan Bapak Prof. Dr. Idris, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : (1) Sejauhmana pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Barat, (2) Sejauhmana pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Barat, dan (3) Sejauhmana pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dan induktif menggunakan data panel pada 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2021. Metode analisis menggunakan regresi data panel dan metode yang terpilih adalah *fixed effect model* yang diolah menggunakan Eviews 12.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Barat. (2) Pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat, dan (3) pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat. Disarankan kepada pemerintah mengoptimalkan anggaran pada sektor Pendidikan dan Kesehatan supaya dapat terdistribusi secara menyeluruh serta dapat meningkatkan pembangunan manusia dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh berbagai wilayah guna memaksimalkan penerimaan pendapatan untuk membiayai belanja daerah dialokasikan untuk pembangunan manusia.

Kata Kunci : *Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik, skripsi ini berjudul **“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat”**. Shalawat serta salam tidak lupa kita ucapkan kepada nabi junjungan umat manusia seluruh alam Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan seperti penulis rasakan pada saat sekarang ini. Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk dapat memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar akademik Sarjana Ekonomi, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak mengalami kesulitan, namun berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan kesulitan tersebut telah dapat diatasi. Semua tidak terlepas dari do'a dan dukungan yang diberikan oleh segenap keluarga besar. Untuk itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Teristimewa terimakasih kepada orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang, sekaligus sebagai dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, masukan dan saran dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Novya Zulva Riani, SE, M.Si selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang dan Bapak Dr. Joan Marta SE, M.Si selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Alpon Satrianto, S.E, M.E selaku dosen Penguji I yang telah memberikan ilmu, masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Urmatul Uska Akbar, S.E, M.E selaku dosen penguji II yang telah memberikan ilmu, masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu pengetahuan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Staff Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang yang telah menyediakan berbagai referensi dan waktu dalam menyelesaikan skripsi penulis.
8. Kak Asma Lidya, Amd selaku Admin Departemen Ilmu Ekonomi yang telah membantu penulis dalam berbagai hal pengurusan administrasi.
9. Terimakasih kepada Dhea Maidani Al noor selaku sahabat selama 8 tahun ini yang telah ada mendengarkan setiap keluhan, memberikan do'a, motivasi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terimakasih kepada Putri dan Marwah yang telah memberikan semangat selama masa awal perkuliahan dan selama masa penyelesaian skripsi ini.
11. Terimakasih kepada sahabat dan teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu telah mendengarkan segala keluh kesah dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Masih banyak pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya, oleh karena itu penulis memohon maaf dan semoga bantuan, bimbingan, masukan serta arahan yang telah diberikan kepada peneliti mendapatkan pahala dan balasan dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, dan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dari skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini nantinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Padang, Juli 2023

Raihana Dzakiyyah Zulfian

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS.....	14
A. Kajian Teori	14
1. Indeks Pembangunan Manusia	14
2. Pengeluaran Pemerintah	17
3. Pendapatan Asli Daerah	19
4. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	21
5. Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia	23
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Konseptual	26
D. Hipotesis	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	30
C. Jenis Data dan Sumber Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data	32
E. Definisi Operasional.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian	40

B. Pembahasan Hasil Penelitian.....	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penelitian Terdahulu	24
Tabel 2.	Definisi Operasional.....	32
Tabel 3.	Data Jumlah Penduduk Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2021 .	41
Tabel 4.	Data Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2021 (Indeks)	43
Tabel 5.	Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2021 (Juta Rupiah).....	46
Tabel 6	Data Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2021 (Juta Rupiah).....	49
Tabel 7.	Data Pendapatan Asli Daerah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2021 (Juta Rupiah).....	52
Tabel 8.	Uji Chow	54
Tabel 9.	Uji Hausman.....	55
Tabel 10.	Uji Multikolinearitas	56
Tabel 11.	Uji Heteroskedastisitas.....	56
Tabel 12.	Uji Regresi Data Panel	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2021 (Indeks).....	4
Gambar 2.	Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan sektor Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2021 (Juta Rupiah)	7
Gambar 3.	Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2021 (Juta Rupiah).....	10
Gambar 4.	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Data Panel Penelitian.....	74
Lampiran 2.	Hasil Uji Chow	78
Lampiran 3.	Uji Hausman.....	79
Lampiran 4.	Common Effect Model.....	80
Lampiran 5.	Fixed Effect Model.....	80
Lampiran 6.	Random Effect Model	81
Lampiran 7.	Uji Heteroskedastisitas	82
Lampiran 8.	Uji Multikolinearitas	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi yang dilaksanakan suatu negara tidak hanya ditinjau berdasarkan pada proses pertumbuhan ekonomi, akan tetapi pada saat proses pembangunan ekonomi akan mencakup perubahan struktur ekonomi, struktur sosial dan perubahan perilaku masyarakat yang telah merasakan dampak pembangunan suatu perekonomian. Suatu proses pembangunan ekonomi terdiri atas beberapa arah pembangunan yaitu pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana) dan pembangunan manusia. Tolak ukur pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan pada indeks pembangunan manusia (IPM), salah satu bentuk yang mendasari peningkatan pembangunan adalah indeks pembangunan manusia yang memiliki tujuan untuk dapat mencapai kesejahteraan manusia. Berdasarkan pada penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya bersumber dari pembangunan ekonomi akan tetapi juga dapat melalui pembangunan manusia.

Keberhasilan suatu pembangunan nasional tidak hanya dilihat berdasarkan pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, akan tetapi harus diikuti dengan keberhasilan pembangunan manusia (Islamiatus Izzah & Martha Hendarti, 2021). Keberhasilan pembangunan nasional dan pembangunan manusia menjadi permasalahan dihadapi berupa terdapat kesenjangan antara daerah dan pusat yang harus dapat diatasi dikarenakan pembangunan manusia tidak dapat berjalan dengan

baik jika mengandalkan pengelolaan kewenangan yang hanya berasal dari pusat sehingga pengelolaan pembangunan manusia di daerah juga diperlukan.

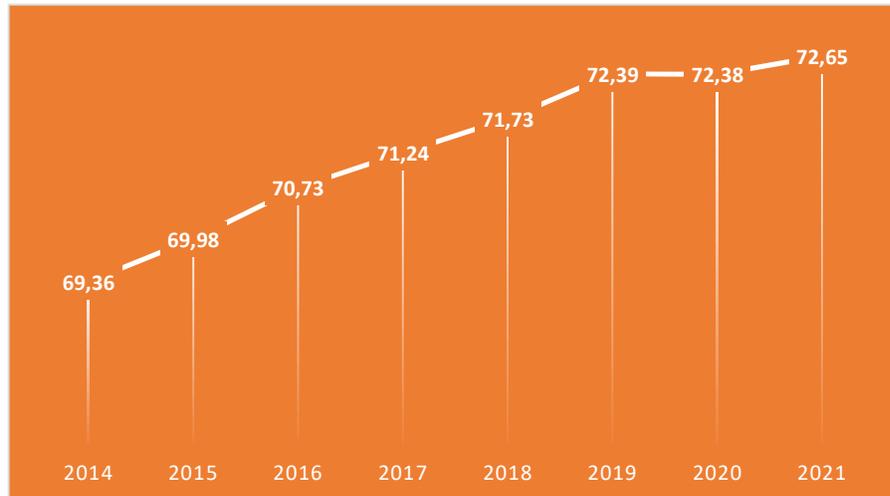
Suatu bentuk upaya yang telah dibentuk oleh Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menentukan ukuran standar yaitu *Human Development Index* (HDI) atau yang sering disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990. Upaya indeks pembangunan manusia dalam menganalisis perbandingan status pembangunan sosial dan ekonomi, baik di suatu negara sedang berkembang maupun pada negara maju (Wahyuningsih, 2020). Indeks Pembangunan manusia dibentuk sebagai salah satu indikator penting untuk dapat menilai dan menganalisis suatu keberhasilan pembangunan pada suatu negara. UNDP menjelaskan bahwa IPM merupakan suatu bentuk standar atau proses untuk dapat melihat bagaimana peningkatan standar hidup masyarakat (Febrianti, 2022).

Indeks pembangunan manusia merupakan suatu indikator ukuran untuk dapat mengetahui bagaimana kualitas hidup pembangunan manusia dan capaian pembangunan yang ada di suatu daerah. Pembangunan manusia memiliki ukuran dengan 3 pembagian dasar meliputi umur panjang, pengetahuan, dan kemampuan ekonomi yang dimiliki masyarakat. Peningkatan suatu perekonomian yang dilakukan oleh suatu daerah tidak hanya bergantung terhadap jumlah sumber daya manusia yang dimiliki akan tetapi juga memiliki pengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada. UNDP menetapkan beberapa bagian dalam menetapkan suatu daerah termasuk ke dalam IPM diantaranya pemerataan sosial, ekonomi keberlanjutan, pemberdayaan dan produktivitas masyarakat.

Menurut BI, (2022) Angka indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat ketiga dari sepuluh provinsi yang ada pada pulau Sumatera sebesar 72,65, Provinsi Sumatera Barat dapat dikatakan daerah yang sedang berkembang dan memiliki peran dalam pengembangan sumber daya manusia. Pada segi pembangunan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat akan menjadi patokan dalam pengembangan perekonomian masyarakat. Dengan adanya peningkatan dalam indeks pembangunan manusia maka akan berdampak terhadap peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia.

Pada Provinsi Sumatera Barat yang saat ini menduduki peringkat ketiga dari tingginya indeks pembangunan manusia di pulau Sumatera, akan tetapi terdapat kondisi dimana adanya perbedaan pencapaian indeks pembangunan manusia di berbagai kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Sehingga pada tingkat indeks pembangunan di berbagai kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat mengalami disparitas antar tingkat indeks pembangunan manusia yang ada di berbagai kabupaten/kota. Hal tersebut dapat dikarenakan kurang memadainya berbagai macam fasilitas publik yang ada di daerah bersangkutan dan kurangnya tempat tinggal yang layak yang menyebabkan tingkat indeks pembangunan manusia pada daerah bersangkutan tidak mengalami peningkatan yang maksimal.

Berikut ini disajikan data indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2021 :



Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2021 (Indeks)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Berdasarkan Gambar 1. pada tingkat indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014-2015 tingkat IPM di Provinsi Sumatera Barat tergolong kepada IPM sedang, sedangkan pada tahun 2016-2021 IPM Provinsi Sumatera Barat dengan angka diatas 70 % merupakan IPM tinggi, akan tetapi pada tahun 2020 indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan sekitar 1 % dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan kemunduran dalam perekonomian dan pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia tertinggi terjadi pada tahun 2021 mencapai nilai 72,65%, maka dapat diartikan bahwa pembangunan manusia Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan dan lebih baik setiap tahunnya.

Seberapa besar nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat menjelaskan bagaimana nilai perkembangan pembangunan manusia pada suatu daerah. Berdasarkan hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pemerintah juga memiliki peran dalam proses penyelenggaraan sistem pemerintahan. proses pembangunan manusia dapat terjadi berdasarkan pada peningkatan kualitas dari alokasi pengeluaran pemerintah yang memberikan dampak terhadap peningkatan produktivitas penduduk yang akan dapat memberikan pengaruh besar atau kecilnya suatu pembangunan manusia, yang digunakan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia secara maksimal.

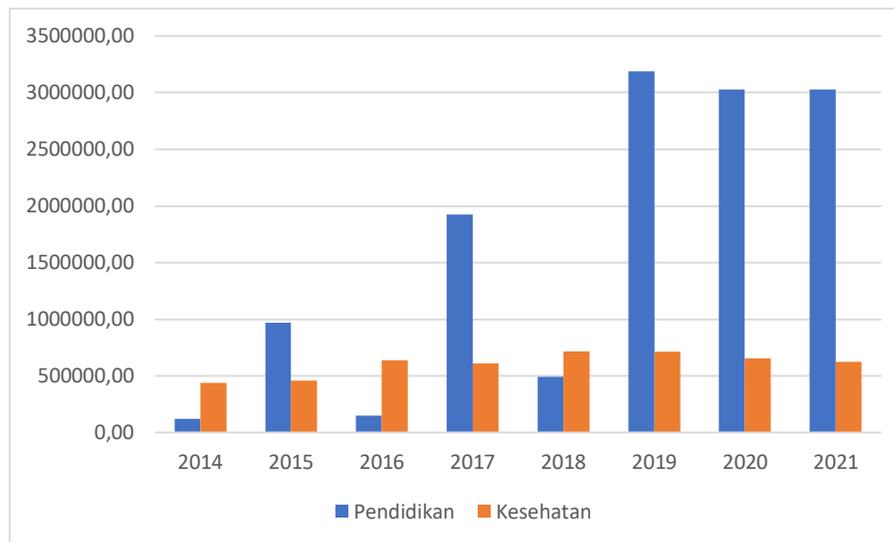
Peningkatan kualitas pembangunan manusia dapat dilihat berdasarkan pada pengeluaran pemerintah, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah baik pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Peran pemerintah dalam pengeluaran pemerintah bertujuan untuk memanfaatkan dan memaksimalkan pembangunan dari berbagai sektor-sektor publik yang ditujukan untuk mencapai pembangunan manusia dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor publik berupa sektor pendidikan dan kesehatan maka akan dapat meningkatkan produktivitas penduduk dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (Firmansyah et al., 2020).

Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan memiliki pengaruh terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dikarenakan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan digunakan untuk menunjang fasilitas pendidikan hal tersebut dapat menunjang mutu

pendidikan yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan juga memiliki pengaruh terhadap indeks pembangunan manusia, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan digunakan untuk dapat meningkatkan fasilitas kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat. Semakin baiknya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dimiliki maka akan dapat meningkatkan tingkat pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan yang ada pada Provinsi Sumatera Barat.

Fungsi dan kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan tetapi terdapat kondisi dimana upaya penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan yang kurang maksimal dan tidak memadai yang akan dapat mempengaruhi peningkatan indeks pembangunan manusia pada Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut dapat terjadi kesenjangan yang dirasakan oleh masyarakat, dan berdampak terhadap indeks pembangunan manusia yang menurun. Tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat merupakan acuan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan manusia.

Berikut ini disajikan data Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan sektor Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2021



Gambar 2. Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan dan sektor Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2021 (Juta Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Berdasarkan pada Gambar 3 memperlihatkan bahwa Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan pada tahun 2014-2021 di Provinsi Sumatera Barat terus mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil setiap tahunnya, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2019 senilai Rp 3.185.362.55 dan pengeluaran pemerintah terendah terjadi pada tahun 2014 senilai Rp 122.249,07. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan pada tahun 2014-2021 pada Provinsi Sumatera Barat terus mengalami kenaikan dan penurunan yang tidak stabil, kenaikan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tertinggi terjadi pada tahun 2018 senilai Rp 714.427,96 dan pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2014 senilai Rp 437.727,16. Terjadinya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan yang tidak stabil akan dapat mempengaruhi indeks pembangunan

manusia, karena secara umum dapat diartikan bahwa jika pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan maka pembangunan manusia akan dapat mengalami peningkatan dan sebaliknya jika pengeluaran pemerintah mengalami penurunan maka pembangunan manusia akan dapat mengalami kemunduran.

Penelitian yang dilaksanakan oleh (Wafa et al., 2023) yang menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh (Ayu Bhakti et al., 2018) menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hal tersebut dapat terjadi karena struktur alokasi pengeluaran pemerintah pendidikan belum cukup maksimal dalam pembangunan kualitas manusia. Hal tersebut dipertegas dengan alokasi dana pendidikan tidak menyebar secara merata. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia, hasil penelitian ini dipertegas dengan kebijakan pemerintah yang telah menyediakan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tingkat ketergantungan antara pemerintah daerah yang besar kepada pemerintah pusat yang menyebabkan penerimaan daerah relatif lebih rendah (Rangkuty et al., 2022). Dengan adanya ketetapan pemerintah mengenai kebebasan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan kebebasan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam upaya melaksanakan otonomi daerah, maka diharapkan suatu daerah dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah tersebut secara maksimal.

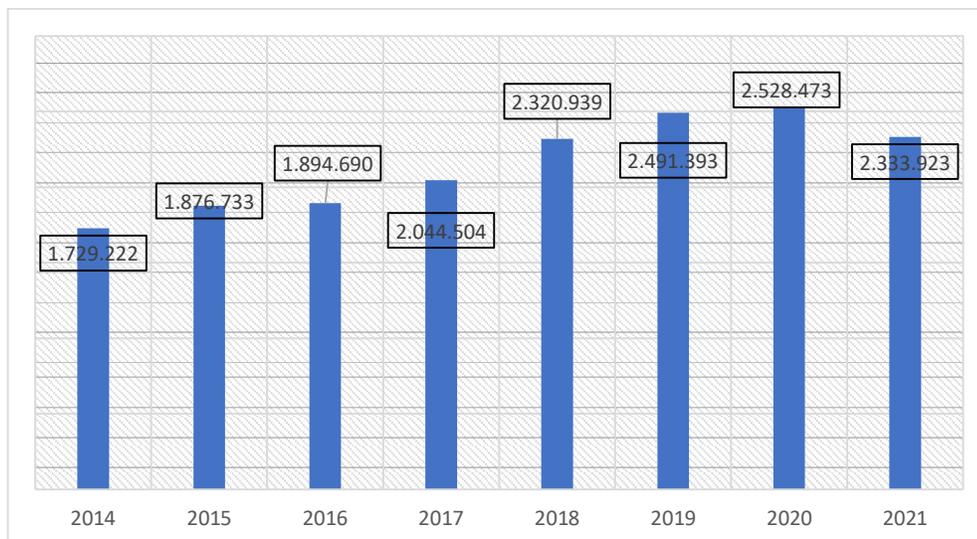
Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan suatu penerimaan yang bersumber dari daerah itu sendiri yang dimanfaatkan untuk dapat membiayai sebagian besar belanja untuk meningkatkan pembangunan dan menjalankan pemerintah menggali sumber daya yang tersedia (Febrianti, 2022). Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan di suatu daerah. Suatu daerah dapat dikatakan berhasil dalam suatu pembangunan apabila daerah tersebut dapat mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut yang akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Menurut UU nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pungutan yang dilakukan suatu daerah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan suatu penerimaan yang dapat diperoleh berdasarkan pada sumber-sumber kekayaan yang dimiliki daerah. Pada UU nomor 33 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan pendapatan asli daerah yang sah (Nurhabibah et al., 2022).

Indeks pembangunan manusia memiliki hubungan yang kuat dalam peningkatan pendapatan, bersumber dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah yang digunakan untuk membiayai pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah melalui pendapatan asli daerah. Diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan asli daerah maka akan memberikan kekuatan suatu daerah dalam mengatur wewenang keuangan yang dimiliki daerah semakin tinggi, akan tetapi tingginya pendapatan asli daerah dianggap tidak dapat

mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan yang dimiliki oleh suatu wilayah dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang dapat memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah. Kondisi sosial masyarakat yang bermacam-macam menyebabkan keberhasilan pembangunan tidak bisa terlepas dari kinerja yang dimiliki oleh pemerintah, tingginya konsumsi yang dimiliki setiap wilayah belum dapat tercukupi.

Berikut ini disajikan data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2014-2021 :



Gambar 3. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2021 (Juta Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Pada Gambar 4 berdasarkan pada gambar diatas dapat dilihat bahwa pendapatan asli daerah tahun 2014-2020 Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan pendapatan asli daerah yang tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai angka sebesar Rp 2.528.473, pada tahun

2021 pendapatan asli daerah mengalami penurunan senilai Rp 2.333.923 yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dapat berdampak terhadap penurunan pendapatan yang diterima oleh daerah. Pendapatan asli daerah merupakan suatu bentuk pemanfaatan pendapatan yang diterima daerah untuk suatu daerah dapat melaksanakan otonomi dan peningkatan pembangunan daerah dengan cara meningkatkan potensi sumber daya yang dimiliki daerah maka akan dapat berdampak positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan pada penelitian yang dilaksanakan oleh (Suarjana & Murni, 2018) menjelaskan bahwa Pendapatan asli daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Menjelaskan bahwa bahwa apabila pendapatan asli daerah semakin tinggi maka indeks pembangunan manusia kabupaten/kota akan semakin tinggi juga. Sedangkan pada penelitian yang dilaksanakan oleh Hauzan et al. (2021) mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap indeks pembangunan manusia.

Dalam upaya peningkatan kualitas IPM yang dimiliki Provinsi Sumatera Barat saat ini masih terdapat kondisi terjadinya ketidakmerataan pembangunan manusia dan terdapat beberapa kondisi yang dapat berpengaruh terhadap pengurangan indeks pembangunan manusia berupa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, sektor kesehatan dan pendapatan asli daerah Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas penulis mengambil judul mengenai **“Pengaruh Pengeluaran pemerintah, dan**

Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut dirumuskan masalah yaitu :

1. Sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan manusia?
2. Sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap Indeks Pembangunan manusia?
3. Sejauh mana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia?
4. Sejauh mana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan, dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah penelitian, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap indeks pembangunan manusia;
2. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia;

3. Mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia;
4. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan, kesehatan, dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan bermanfaat bagi :

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu prasyarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Departemen Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Pembaca

Sebagai salah satu sumber acuan untuk dapat melanjutkan penelitian dan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang ingin diteliti

3. Bagi pemerintah

Sebagai suatu pertimbangan untuk pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah, sesuai dengan sasaran utama kebijakan tersebut dibuat sesuai dengan indeks pembangunan manusia

4. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan

Sebagai pedoman untuk pelaksanaan perluasan wawasan ilmu pengetahuan pada ilmu ekonomi pembangunan dalam proses peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Amartya Sen dalam Putra (2018a) menjelaskan bahwa indeks dapat dikatakan bahwa dalam bentuk pengukuran secara vulgar atau kasar. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan pembangunan manusia di sebuah negara termasuk kedalam negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Dapat juga untuk dapat mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup dan digunakan untuk dapat mengukur kebijakan ekonomi pada kualitas ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia dibentuk oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) yang dibentuk pada tahun 1990 dan dijelaskan secara berkala pada setiap tahunnya oleh *Human Development Report* (HDR) pembangunan manusia merupakan suatu bentuk proses untuk dapat memperbanyak bentuk pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia berlandaskan pada sejumlah bentuk komponen dasar kualitas hidup. Sebagai dasar dari pengukuran ukuran kualitas hidup, IPM dibentuk melalui tiga pendekatan dasar, pandangan tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga pandangan tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor yang dapat mempengaruhinya (Wahyuningsih, 2020).